

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas perkenannya, Kita dapat menyusun buku Road Map Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo 2018-2022 dengan lancar.

Reformasi birokrasi merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan oleh birokrasi sebagai bentuk adaptasi organisasi terhadap lingkungan. Perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatnya pemahaman dan kepedulian serta tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Masyarakat menghendaki adanya perubahan pada birokrasi kearah terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah.

Kita menyadari mereformasi birokrasi Kota Probolinggo bukan pekerjaan yang mudah, hal ini menyangkut sistem, pola pikir, dan pola kerja ribuan orang pegawai. Selain itu banyak kendala dan permasalahan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, perlu komitmen dan kesungguhan semua pihak, terutama para pimpinan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Saat ini masyarakat sudah pintar dan sangat kritis dalam menilai kinerja instansi pemerintah dan juga terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang menilai apakah instansi pemerintah sudah reform atau belum. Hal terpenting bagi masyarakat dari pemerintah adalah pelayanan publik berkualitas baik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dokumen Road Map ini memberikan arah bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo serta memberikan informasi mengenai sasaran, proses perubahan dan rencana pencapaian serta anggaran.

Demikian, semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Kita semua. Amien.

Probolinggo, Juli 2018
WALI KOTA PROBOLINGGO
Ttd,
Hj. RUKMINI, SH. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	I-3
1.3. Tujuan	I-5
1.4. Kegunaan	I-5
1.5. Sistematika	I-5
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	II-9
2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo	II-9
2.2. Harapan Pemangku Kepentingan	II-13
2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo	II-15
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	III-19
3.1. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	III-19
3.1.1. Proses Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah	III-19
3.1.2. Proses yang Harus Terus Dipelihara	III-23
3.1.3. Proses yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan	III-24
3.2. Sasaran	III-25
3.3. Program dan Kegiatan	III-31
3.4. Pengorganisasian	III-34
3.5. Rencana Aksi	III-35
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	IV-45
4.1. Monitoring	IV-45
4.2. Evaluasi	IV-46
BAB V PENUTUP	V-48

DAFTAR TABEL

1.1.	Sistematika Penulisan Road Map Reformasi Birokrasi	I-6
3.1.	Sasaran Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo	III-25
3.2.	Matrik Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2018-2022	III-36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendahuluan

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai jawaban atas semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penatalaksanaan pemerintahan menuju *Good Governance*, antara lain mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk itu Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Reformasi Birokrasi adalah penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Gambaran Birokrasi

Gambaran umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional. Pada saat ini pemerintah kota menjadikan satu perangkat daerah yakni DPMPTSP sebagai *pilot project* penerapan Zona Integritas sebagai embrio untuk penerapan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pemerintah Kota Probolinggo juga telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2013-2014 dan pada tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2016 nilainya 79,3 (kategori baik).

Selain itu, sebagian besar satuan/ unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan yang merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan. Pada evaluasi kinerja pemerintah daerah di bidang pelayanan publik dengan diadakan gelar inovasi pelayanan publik dan masuknya top 99 inovasi pelayanan publik KemenpanRB Tahun 2017 yakni “ PELITA SI ABAH “ dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Pemantapan visi sebagai kota jasa dengan kegiatan promosi investasi menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam kemudahan pelayanan perizinan usaha. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 sebesar 60,14 dengan kategori B (baik).

Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) diharapkan meliputi seluruh perangkat daerah dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sehingga nilai ZI-WBK termasuk tinggi. Nilai efisiensi (penggunaan anggaran) semakin baik, dengan adanya ketersediaan anggaran yang proporsional, kesesuaian, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta meningkatnya efisiensi belanja modal dengan penerapan *e-proc* 100% dari paket yang dilelangkan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diharapkan tinggi dengan hasil survey. Selanjutnya Pemerintah Kota Probolinggo tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Kondisi pelayanan publik diharapkan lebih baik yang ditandai dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi sangat baik atau diatas 80,00 Semua penyelenggara/ pelayanan publik juga mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada Standar Pelayanan (SP).

Akuntabilitas kinerja yang diharapkan semakin baik dengan predikat sangat baik dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai 80. Kondisi ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Probolinggo tinggi dan program/ kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Adanya penilaian kinerja secara komprehensif yang menunjukkan nilai kinerja organisasi yang lebih tepat dan diharapkan nilai kinerja organisasi yang tinggi dengan outcome nyata bagi masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dan akan dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo dalam capaian sasaran reformasi birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yaitu sumber daya manusia, pola pikir dan budaya kerja, akuntabilitas, pelayanan publik, Penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan dan pengawasan.

Permasalahan sumber daya manusia antara lain : penempatan pegawai belum sesuai kompetensi dan kualifikasi, komposisi pegawai yang tidak proposional serta profesional, belum adanya job mapping dan job class, pengukuran kinerja yang belum optimal, belum ada standard kompetensi jabatan, talent pool dan pola karir serta penegakan disiplin dan perlindungan hukum terhadap ASN atas fungsi dan kewenangan jabatannya.

Permasalahan pola pikir dan budaya kerja antara lain pelaksanaan budaya kerja yang belum optimal dan belum adanya agen perubahan ditingkat pemerintah kota.

Permasalahan akuntabilitas antara lain penyusunan indikator kinerja utama belum sinkron dengan susunan organisasi tata kerja baru perangkat daerah, belum optimal SAKIP dan pengolahan data LPPD, perlunya penyesuaian RPJMD dengan susunan organisasi tata kerja baru serta belum terintergrasinya system perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Permasalahan pelayanan publik antara lain sistem informasi perizinan belum terintegrasi, kegiatan promosi investasi belum optimal, pendayagunaan aplikasi yang kurang optimal dan belum seluruh perangkat daerah melaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan memanfaatkan media secara optimal.

Permasalahan penataan dan penguatan organisasi antara lain adanya perangkat daerah yang kurang tepat tugas dan fungsi, pelimpahan kewenangan yang kurang optimal, belum dilaksanakan evaluasi dan analisis kemampuan organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

Permasalahan tatalaksana yang utama adalah perangkat daerah belum menyusun dan melaksanakan *business proses* serta evaluasi standar operasional prosedur yang telah disusun atau dibuat, pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal, penerapan *eletronik government (e-gov)* yang belum dilakukan maksimal.

Permasalahan peraturan perundang-undangan antara lain penyusunan dan peningkatan legal drafter, belum adanya indentifikasi, analisis dan pemetaan peraturan yang efektif, sosialisasi kebijakan atas peraturan kurang optimal.

Permasalahan pengawasan adalah peranan satgas SPIP di perangkat daerah yang belum optimal, belum optimal sinergisitas pengawasan internal dan eksternal, belum terbentuk layanan konsultasi

akuntabilitas, belum dilaksanakan survey dan penilaian indek persepsi korupsi serta pembentukan tim penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan dan evaluasi zona integritas belum bagi seluruh perangkat daerah.

Agenda Reformasi Birokrasi

Proses pembenahan manajemen pemerintahan daerah adalah fokus perubahan yang menjadi tujuan perubahan daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, yaitu yaitu sumber daya manusia, pola pikir dan budaya kerja, akuntabilitas, pelayanan publik, Penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan dan pengawasan.

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Kota Probolinggo antara lain redistribusi pegawai secara merata sesuai beban kerja dan kompetensinya, evaluasi struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal, pemberian sanksi yang konsisten bagi PNS yang melanggar peraturan dan disiplin pegawai, penerapan penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja pegawai yang memadahi guna mendorong peningkatan kinerja pegawai.

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pola pikir dan budaya kerja birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo meliputi penyusunan peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap, penerapan budaya kerja berbasis kinerja mengutamakan *output* dan *outcome* yang terukur, peningkatan komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (*role model*), internalisasi pola pikir dan budaya kerja organisasi ke seluruh pegawai, penilaian prestasi kerja dan pemberian penghargaan pegawai secara obyektif, internalisasi Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) di semua OPD untuk menciptakan pengendalian intern yang memadahi, peningkatan penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Prioritas pembenahan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo meliputi pembangunan sistem informasi kinerja instansi pemerintah daerah, peningkatan kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten, pemanfaatan dokumen kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja, peningkatan koordinasi antar OPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik sebagai indikator RPJM/ Resntra, evaluasi perencanaan kegiatan OPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

OPD dan minimalisasi kegiatan yang tidak ada dalam dokumen perencanaan awal, penerapan penilaian kinerja OPD secara komprehensif, dan peningkatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas kinerja.

Prioritas membenahan pelayanan publik Pemerintah Kota Probolinggo meliputi peningkatan kompetensi SDM yang sesuai tugas/ pekerjaan pada satuan/unit pelayanan dan pendistribusian SDM secara merata/ proporsional, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik peningkatan kepatuhan penyelenggara/ pelaksana pelayan publik terhadap Standar Pelayanan yang telah dibuat, dan peningkatan pengawasan dan pembinaan OPD terhadap unit-unit pelayanan publik yang ada di bawahnya.

Prioritas yang harus terus diperlihara merupakan keberhasilan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang harus terus dipelihara dan dipertahankan. Berikut uraian Prioritas yang harus terus diperlihara antara lain mempertahankan 2 (dua) OPD yang telah memperoleh predikat WBBM dan WBK, mempertahankan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah, mempertahankan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit pelayanan publik sebesar 76,75 (baik), mempertahankan prosentase unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan (SP) dan berupaya meningkatkan, mempertahankan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah di bidang pelayanan publik tahun 2011 sangat baik (>850) dengan diperolehnya piala CBAN, mempertahankan prosentase Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan dokumen kinerja 99,71%, dan meningkatkan aplikasi penyusunan rencana anggaran sudah menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan prioritas daerah meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan usaha, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Prioritas perubahan dalam pelayanan kesehatan adalah penerapan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Prioritas perubahan dalam pelayanan pendidikan meliputi informasi layanan peserta didik, membenahan tata laksana dan pengembangan sistem, reformasi layanan satuan pendidikan, dan beasiswa siswa dari keluarga tidak mampu.

Prioritas perubahan dalam pelayanan perizinan usaha meliputi penyederhaan prosedur pelayanan perizinan usaha, peningkatan pelayanan melalui peningkatan koordinasi dan percepatan proses perizinan usaha di BPMP2T Kota Probolinggo dan proses penerbitan rekomendasi teknis dari OPD lain yang membidangi.

Prioritas perubahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi peningkatan akses pelayanan dengan jemput bola, pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan terpadu antara desa dan kabupaten, serta peningkatan pelayanan kependudukan melalui percepatan proses penerbitan akte kelahiran untuk bayi yang baru lahir.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Probolinggo dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan. Rencana Aksi berisi program/kriteria/subkegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan secara periodik. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

